

Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai untuk Mensejahterakan Masyarakat di Desa Warisa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara

Veronika Monika Rorimpandey¹

Johny P Lengkong²

Fanley Pangemanan³

Email Korespondensi: veronikamonika020703@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai untuk mensejahterakan masyarakat di desa Warisa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warung yang bekerja sama dengan Bank Penyalur. Pelaksanaan penyaluran bantuan ini dilakukan empat kali dalam satu tahun. Penyaluran dilakukan per triwulan dengan nominal Rp.200.000 per bulan, sehingga penerima mendapatkan Rp.600.000 setiap kali cair. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai dan tingkat efektivitasnya. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari Pemerintah Desa Warisa, Pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai, Pemilik E-Warung, dan Warga Masyarakat yang menerima manfaat program. Fokus penelitian mengacu pada indikator efektivitas menurut Budiani, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Pangan Non Tunai belum berjalan optimal. Sosialisasi yang belum sepenuhnya efektif, data penerima yang tidak diperbarui, dan lemahnya pemantauan menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pendataan penerima program, penerapan sistem voucher atau kupon sebagai pengganti alat pencairan bantuan, peningkatan peran pendamping program, serta pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan bantuan.

Kata Kunci : Efektivitas, Bantuan, Kesejahteraan, Masyarakat

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Politik FISIP-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat

Pendahuluan

Program Bantuan Pangan Non Tunai ialah program bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada masyarakat yang tergolong sebagai penerima manfaat melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan untuk membeli bahan pangan di toko / warung yang sudah berkolaborasi dengan Bank Penyalur yang disebut E- warung. Bantuan ini tidak bisa diambil secara tunai serta hanya dapat ditukarkan dengan beras serta telur sesuai dengan kebutuhan yang disediakan oleh E-warung. Tujuan ditukarkannya dengan beras serta telur supaya kebutuhan gizi karbohidrat serta protein masyarakat tercukupi.

Keberhasilan program lebih efektif harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) khususnya di Desa Warisa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara ada beberapa identifikasi permasalahan antara lain:

1. Data yang digunakan untuk penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai masih menggunakan data lama sehingga banyak yang tidak tepat sasaran.
2. Sebagian penerima manfaat mencairkan bantuan dalam bentuk uang tunai, padahal sesuai ketentuan bantuan seharusnya digunakan untuk membeli kebutuhan pokok di e-warung yang telah ditunjuk pemerintah.

Berdasarkan fenomena diatas bahwa cara untuk menggapai

keberhasilan suatu program dengan menentukan efektivitas program tersebut, Sutrisno (2007: 125). Suatu program dapat diukur melalui 6 indikator (Darmawan & Adiwidjaja, 2019), antara lain:

1. Ketepatan sasaran
2. Pemahaman program
3. Ketepatan waktu
4. Tercapainya tujuan serta
5. Perubahan nyata

Maka bersumber pada uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Untuk Mensejahterakan Masyarakat di Desa Warisa Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara”.

Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya target (Fahreza, Arifin, & Suryani, 2019). Menurut Makmur (2011:7) mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan Ketepatan penentuan waktu, ketepatan dalam menentukan pilihan, ketepatan dalam menentukan tujuan, dan ketepatan sasaran. Arifin dan Soesatyo bahwa kesejahteraan adalah dimana suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara baik, baik kebutuhan material (pangan, sandang, dan papan) maupun kebutuhan non material (pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal).

Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun program bantuan sosial seperti BPNT telah dijalankan, efektivitasnya dalam menurunkan angka kemiskinan masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, kajian terhadap pelaksanaan dan dampak BPNT perlu dilakukan secara

mendalam untuk memastikan bahwa program ini benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Warisa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Pemerintah Desa, Pendamping Program BPNT, Pemilik e-warung, serta warga masyarakat Warisa yang menerima manfaat program.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Menurut Miles dan Huberman dalam (1994), ada beberapa tahapan dalam pengolahan data kualitatif, diantaranya yaitu:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

Pembahasan

Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk membantu keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan pangan serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Pelaksanaan program ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menyatakan bahwa

penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara agar dapat hidup layak dan bermartabat.

Selain itu, pelaksanaan program BPNT juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan bantuan sosial bagi masyarakat miskin melalui program yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Program BPNT dirancang sebagai salah satu instrumen kebijakan untuk memastikan bantuan pangan dapat diterima secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui mekanisme non-tunai.

Di tingkat pelaksanaan, program BPNT di Desa Warisa melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, pendamping program, pengelola e-Warung, hingga masyarakat penerima bantuan. Keterlibatan berbagai unsur ini mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, sebagaimana diharapkan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Pemerintah desa berperan dalam pendataan dan koordinasi, sementara pendamping dan e-Warung berfungsi dalam mendukung teknis penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, secara umum program BPNT di Desa Warisa telah berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan dan meringankan beban pengeluaran keluarga. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala,

seperti pembaruan data penerima yang belum optimal, sosialisasi yang belum merata, pemanfaatan bantuan yang belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan program, serta pemantauan yang belum dilakukan secara rutin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program telah berjalan sesuai dengan kerangka kebijakan dan peraturan perundang-undangan, efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan.

Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan secara lebih mendalam pelaksanaan program BPNT di Desa Warisa berdasarkan indikator-indikator penelitian, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Pembahasan ini dilakukan dengan mengaitkan hasil temuan lapangan dengan teori serta penelitian terdahulu, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan program BPNT di Desa Warisa.

1. Sosialisasi Program BPNT

Sosialisasi program merupakan proses penyampaian informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tujuan, manfaat, serta mekanisme pelaksanaan suatu program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi program BPNT di Desa Warisa telah dilakukan melalui pertemuan langsung di kantor desa serta penyampaian informasi menggunakan pengeras suara. Bentuk sosialisasi ini membantu masyarakat mengetahui tujuan program, kriteria penerima, serta mekanisme penggunaan kartu BPNT di e-Warung. Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa sosialisasi tersebut cukup membantu dalam memahami program.

Namun, temuan lapangan juga menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang digunakan belum sepenuhnya efektif menjangkau seluruh masyarakat. Penggunaan pengeras suara memiliki keterbatasan, terutama bagi warga yang tidak berada di rumah saat informasi disampaikan. Selain itu, masih terdapat masyarakat, khususnya lansia dan penerima baru, yang belum sepenuhnya memahami penggunaan kartu BPNT dan tujuan program, bahkan ada yang menggunakan bantuan tidak sesuai peruntukannya.

Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih komprehensif, seperti pendampingan langsung, penggunaan media komunikasi yang beragam, serta pelibatan aktif pendamping dan perangkat desa, agar seluruh masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan program BPNT secara optimal.

2. Ketepatan Sasaran Program BPNT

Ketepatan sasaran merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu program bantuan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Warisa, proses penentuan penerima bantuan BPNT telah dilakukan secara bertahap dan melibatkan berbagai pihak. Pendataan dimulai dari tingkat jaga melalui kepala jaga, kemudian dicocokkan dengan data resmi pemerintah seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta dibahas dalam musyawarah desa bersama perangkat desa dan perwakilan masyarakat. Proses ini menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk menerapkan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas dalam menentukan penerima bantuan.

Namun, hasil wawancara dengan masyarakat penerima bantuan

menunjukkan bahwa meskipun program BPNT secara umum telah membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, masih terdapat warga yang seharusnya layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar. Dengan demikian, Program Bantuan Pangan Non Tunai dinilai tidak tepat sasaran karena data penerima yang tidak diperbarui, minimnya sosialisasi, serta lemahnya pengawasan sehingga bantuan tidak selalu diterima oleh keluarga yang benar-benar membutuhkan.

Tahun	Jumlah KK Terdaftar	Perubahan dari tahun sebelumnya	Keterangan
2024	66 KK	-	Pemerintah menggunakan data awal
2025	66 KK	0 (tidak berubah)	Tidak ada verifikasi ulang
2026	66 KK	0 (tidak berubah)	Data tetap digunakan tanpa pemutakhiran, menunjukkan pendataan stagnan selama 3 tahun.

Tabel Data Penerima Program BPNT (sumber : Arsip Dokumen Desa Warisa)

Berdasarkan tabel penggunaan data penerima bantuan selama periode 2024–2026, terlihat bahwa jumlah penerima bantuan tetap 66 Kepala Keluarga (KK) setiap tahun tanpa adanya perubahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa data yang digunakan oleh pemerintah tidak mengalami pemutakhiran selama tiga tahun terakhir. Padahal, dalam rentang waktu tersebut kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat berubah, seperti adanya keluarga yang sudah tidak tergolong miskin maupun keluarga baru yang justru membutuhkan bantuan. Tidak adanya perubahan jumlah penerima ini

mengindikasikan bahwa pemerintah masih menggunakan data lama sehingga berpotensi menyebabkan program bantuan menjadi tidak tepat sasaran.

Syarat – syarat Penerima Program BPNT

1. Keluarga Rentan Miskin
Prioritas diberikan kepada keluarga yang penghasilan hariannya tidak mencukupi kebutuhan pangan dasar.

2. Jumlah Anggota Keluarga
Semakin banyak anggota keluarga yang bergantung pada kepala rumah tangga, semakin besar prioritas untuk menerima BPNT.

3. Tidak Mampu Membeli Pangan Sendiri

Keluarga yang tidak mampu membeli kebutuhan pokok, seperti beras dan telur, akan diprioritaskan.

4. Tingkat Pendidikan Terbatas

Keluarga yang anak-anaknya hanya dapat menempuh pendidikan hingga SLTP menjadi prioritas, karena berkaitan dengan kemampuan ekonomi

3. Pencapaian Tujuan Program BPNT

Tujuan utama program BPNT adalah membantu keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan pangan serta meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Warisa dan masyarakat penerima bantuan, program BPNT secara umum telah berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah. Masyarakat merasakan manfaat nyata berupa terpenuhinya kebutuhan pangan sehari-hari dan berkurangnya beban pengeluaran keluarga. Bantuan yang diterima memungkinkan keluarga mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan lain seperti pendidikan anak dan kebutuhan rumah tangga.

Namun demikian, masih terdapat kendala berupa penggunaan bantuan yang tidak sesuai dengan tujuan program oleh sebagian penerima. Masih pula ditemukan bahwa sebagian masyarakat penerima tidak secara langsung membelanjakan dana bantuan yang telah dicairkan untuk membeli bahan pangan di warung yang telah ditetapkan (e-warung). Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ketidaksesuaian antara waktu pencairan bantuan dengan kebutuhan pangan aktual rumah tangga, sehingga penerima memilih menunda pembelian hingga dianggap lebih diperlukan. Di sisi lain, pemahaman masyarakat mengenai kewajiban dan mekanisme penggunaan bantuan juga tidak merata, sehingga ada penerima yang tidak segera memanfaatkan bantuan sesuai tujuan utama program. Situasi ini menunjukkan bahwa proses penyaluran bantuan tidak selalu berbanding lurus dengan pemanfaatan langsung oleh penerima, serta mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi, dan pengawasan, agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Dengan demikian jika penerima tidak langsung membelikan dana BPNT untuk membeli bahan pangan di e-warung, maka tidak dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pangan mereka sudah terpenuhi. Dalam konteks penelitian ini, penundaan pembelian justru mengindikasikan dua hal: (1) pangan tidak terpenuhi karena bantuan tidak digunakan sesuai tujuan, atau (2) penerima bukan keluarga sangat miskin sehingga kebutuhan pangan tidak mendesak. Kondisi ini menunjukkan bahwa indikator pencapaian tujuan dan pengawasan dalam Program BPNT belum berjalan efektif. Selain itu, tindakan tersebut

mengindikasikan bahwa bantuan tidak digunakan sesuai peruntukannya, karena tujuan utama BPNT adalah memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin melalui akses bahan pangan yang berkualitas dan cukup.

4. Pemantauan dan Pengawasan Program BPNT

Pemantauan dan pengawasan merupakan bagian penting dalam siklus pelaksanaan program, yang bertujuan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan segera mengidentifikasi kendala yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemantauan dan evaluasi program BPNT di Desa Warisa belum dilakukan secara rutin. Pendamping program hanya melakukan pemantauan sesekali dan cenderung menindaklanjuti masalah apabila terdapat laporan dari masyarakat. Pola pemantauan yang bersifat reaktif ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan belum berjalan secara optimal. Pemantauan (monitoring) yang belum dilakukan secara rutin, sistematis, dan berkelanjutan oleh pihak pelaksana baik di tingkat desa maupun pendamping sosial ini menyebabkan berbagai masalah dalam pelaksanaan program tidak teridentifikasi secara cepat, termasuk perilaku penerima bantuan yang tidak langsung membelanjakan dana bantuan, ketidaksesuaian stok di e-warung, serta potensi penyimpangan dalam distribusi komoditas. Secara ideal, pelaksanaan monitoring seharusnya dilakukan setiap bulan mengikuti jadwal penyaluran bantuan agar pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan digunakan sesuai tujuan yaitu untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga. Namun, di lapangan monitoring justru sering dilakukan secara sporadis, hanya ketika ada keluhan masyarakat.

Akibatnya, banyak perilaku penerima bantuan maupun masalah teknis di e-warung yang tidak terpantau, sehingga efektivitas program menurun. Selain itu, kendala teknis seperti keterbatasan jaringan dan pemadaman listrik yang menyebabkan mesin EDC tidak dapat digunakan juga memengaruhi kelancaran distribusi bantuan. Selain itu kenyataannya masyarakat jarang melaporkan penyimpangan karena menganggap kondisi tersebut bukan sebagai masalah.

Secara formal, pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berada di bawah pengawasan pendamping sosial (Pendamping PKH atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) yang bertugas memastikan bahwa penyaluran bantuan berjalan sesuai pedoman, mulai dari verifikasi data penerima, pemantauan transaksi di e-warung, hingga pelaporan kendala yang terjadi di lapangan. Namun, berdasarkan hasil temuan penelitian, pelaksanaan pengawasan di tingkat desa sangat jarang dilakukan secara rutin.

Akibat lemahnya kehadiran pendamping di desa, banyak aspek penting dari program yang tidak terpantau secara memadai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pendamping sosial secara struktural merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan, dalam praktiknya mekanisme monitoring tidak berjalan efektif karena jarang dilakukan di tingkat desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai menunjukkan bahwa tingkat efektivitas program masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari penggunaan bantuan oleh sebagian penerima manfaat yang tidak sesuai dengan tujuan program. Bantuan yang seharusnya digunakan

untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga tidak selalu dimanfaatkan secara langsung untuk membeli bahan pangan di e-warung yang telah ditetapkan. Sebagian penerima menunda penggunaan bantuan atau memanfaatkannya untuk kebutuhan lain di luar tujuan utama program. Jika dikaitkan dengan indikator efektivitas menurut Budiani, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencapaian tujuan program belum terlaksana secara optimal, karena tujuan utama BPNT adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga penerima manfaat. Selain itu, pemantauan program juga belum berjalan secara maksimal, yang terlihat dari jaranganya pengawasan oleh pendamping sosial di tingkat desa. Kurangnya monitoring ini menyebabkan penggunaan bantuan oleh penerima tidak terkontrol dengan baik. Dengan demikian, berdasarkan indikator efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani, pelaksanaan program BPNT di lokasi penelitian dapat dikatakan belum efektif, karena bantuan yang diberikan tidak sepenuhnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan pengawasan program masih belum berjalan secara optimal.

Penutup

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi program BPNT di Desa Warisa menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang digunakan belum sepenuhnya efektif menjangkau seluruh masyarakat. Penggunaan pengeras suara memiliki keterbatasan, masih terdapat masyarakat, khususnya lansia dan penerima baru, yang belum sepenuhnya memahami penggunaan kartu BPNT dan tujuan program.

Berdasarkan hasil penelitian, dengan masyarakat penerima bantuan menunjukkan bahwa meskipun program BPNT secara umum telah membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, masih terdapat warga yang seharusnya layak menerima bantuan tetapi belum terdaftar.

Berdasarkan hasil penelitian masih terdapat kendala berupa penggunaan bantuan yang tidak sesuai dengan tujuan program oleh sebagian penerima. Masih pula ditemukan bahwa sebagian masyarakat penerima tidak secara langsung membelanjakan dana bantuan yang telah dicairkan untuk membeli bahan pangan di warung yang telah ditetapkan (e-warung).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemantauan dan pengawasan program BPNT di Desa Warisa belum dilaksanakan secara rutin dan sistematis. Pemantauan cenderung bersifat reaktif, yaitu dilakukan ketika terdapat laporan dari masyarakat. Selain itu, kendala teknis seperti keterbatasan jaringan dan pemadaman listrik turut menghambat kelancaran distribusi bantuan. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan permasalahan juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan.

Saran

Pemerintah Desa Warisa disarankan untuk meningkatkan kualitas pendataan penerima BPNT dengan melakukan pembaruan data secara berkala dan berkelanjutan. Proses pendataan sebaiknya melibatkan secara aktif perangkat desa, kepala jaga, serta masyarakat setempat agar data yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan kondisi

sosial ekonomi masyarakat terkini. Selain itu, pemerintah desa perlu memperkuat mekanisme verifikasi dan validasi data penerima agar potensi kesalahan sasaran dapat diminimalkan.

Pendamping program BPNT diharapkan dapat meningkatkan perannya tidak hanya sebagai fasilitator penyaluran bantuan, tetapi juga sebagai pendidik dan pengawas program. Pendamping perlu melakukan pendampingan, pemantauan, dan evaluasi secara rutin dan terstruktur, serta memberikan edukasi yang berkelanjutan kepada penerima manfaat mengenai tujuan program dan pemanfaatan bantuan sesuai ketentuan.

Masyarakat penerima manfaat BPNT diharapkan dapat berperan aktif dalam mengikuti kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa maupun pendamping program. Penerima bantuan diharapkan mampu memahami tujuan, mekanisme, serta batasan dalam pemanfaatan bantuan BPNT sehingga bantuan digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian mengenai program BPNT dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda, seperti penelitian kuantitatif atau metode campuran (mixed methods). Penelitian lanjutan juga dapat menambahkan variabel lain, seperti tingkat kepuasan penerima manfaat atau dampak jangka panjang program terhadap kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih komprehensif bagi pengembangan

kebijakan bantuan sosial di masa mendatang.

Daftar Pustaka

Sumber Utama :

- Fauzan, M. K., Budiman, A., & Noorrahman, M. F. (2025). EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA BANUA LAWAS KECAMATAN BANUA LAWAS KABUPATEN TABALONG. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), 924-935.
- Gobel, R., Van Gobel, L., & Antu, Y. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Tolitehuyu, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara.
- Korompis, I. A., & Kartika, D. I. (2025). DAMPAK PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI KELURAHAN RANOTANA WERU KECAMATAN WANEA KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA (Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- Nudu, M. J. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Sumba Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur .
- Rahayu, P., & Fitriani, H. (2023). Efektivitas program bantuan pangan non tunai dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ponorogo.
- Rizki, D. E. (2024). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Sukaraja Kulon Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka. *Jurnal Mahasiswa Sosial Humaniora*, 1(1), 38-55.
- Rizkiansyah, S. D., & PRIHATINI, J. (2025). PENGARUH PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT DI KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH (Doctoral dissertation, IPDN).
- Saputri, A., Isabella, I., & Nofrima, S. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN GANDUS KOTA PALEMBANG TAHUN 2023. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 12(3), 224-235.
- Syafruddin, S., Ikbal, M., & Kalrah, A. (2021). Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi*, 9(2), 104-110.
- Utami, R. D. (2025). Evaluasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam penanggulangan kemiskinan pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Wensen, J., Rotinsulu, T. O., & Rorong, I. P. F. (2023). Analisis Pengaruh Bantuan Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH) Dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bitung. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* Vol, 24(3).
- Yusril, M., Muin, R., & Baharuddin, B. (2022). Efektifitas Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Paku, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. *J-Alif*, 7(1), 18-31.

Undang-undang :

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009
Tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 63 Tahun 2017
tentang Penyaluran Bantuan Sosial
Secara Non Tunai.

Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 25/PMK.05/2015
tentang Belanja Bantuan Sosial
pada Kementerian Negara/Lembaga.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10
Tahun 2017 tentang Program
Keluarga Harapan.

Sumber – sumber lain :

Agustina, I., & Hendra, A. (2021).
Implementasi kebijakan bantuan
langsung tunai (BLT)
bagi masyarakat terdampak COVID-19
di Kecamatan Cileunyi Kabupaten
Bandung.

JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan
Publik),
8(2), 132–144.

<https://doi.org/10.33701/jekp.v8i2.2792>

Badan Pusat Statistik Provinsi
Sulawesi Utara. (2025).
Perkembangan tingkat kemiskinan
Provinsi Sulawesi Utara 2024.

<https://sulut.bps.go.id/id/publication/2025/04/25/30771230db27f58b45531639/perke>

<mbangan-tingkat-kemiskinan-provinsi-sulawesi-utara-2024.html>
931314217_bab2.pdf